



# Masyarakat Diimbau Perkuat Mitigasi Bencana

**YOGYA (KR)** - Awal musim hujan menyebabkan berbagai bencana di sejumlah daerah. Masyarakat pun diimbau memperkuat mitigasi guna mengantisipasi potensi bencana yang mungkin bisa terjadi. Sehingga jatuhnya korban jiwa maupun materi dapat ditekan sedini mungkin.

Pemkot Yogya sejauh ini juga telah meminta seluruh elemen pemerintah dan kelompok di masyarakat untuk menguatkan mitigasi mengantisipasi potensi bencana musim hujan. "Status tanggap darurat bencana belum perlu dikeluarkan. Tetapi yang dibutuhkan adalah memberikan pemahaman bahwa saat ini sudah musim hujan dan perlunya penguatan mitigasi di masyarakat," imbau Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogya Ir Aman Yuriadijaya, Minggu (23/10).

Aman yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogya sudah menginstruksikan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogya Nur Hidayat un-

tuk terus melakukan berbagai upaya meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi bencana musim hujan. Peningkatan kewaspadaan tersebut dapat dilakukan melalui Kampung Tangguh Bencana (KTB) yang saat ini sudah terbentuk di 145 kampung di kota tersebut.

"KTB diminta untuk melakukan deteksi dini potensi kerawanan di wilayah masing-masing saat musim hujan. Deteksi dini ini sangat penting untuk pencegahan agar tidak menimbulkan kerusakan atau korban yang lebih banyak," imbuh Aman.

Sedangkan di lingkungan BPBD Kota Yogya, lanjut Aman, diminta untuk melakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan

dan bersiap untuk segala kemungkinan yang akan dihadapi. Dirinya memastikan seluruh pihak sudah siap dan berharap tidak ada kejadian bencana saat musim hujan.

Sementara itu, untuk mengantisipasi semakin menipisnya anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang dikelola BPBD, Aman menyebut, kebutuhan penanganan bencana bisa dialokasikan melalui anggaran dari instansi lain. "Anggaran untuk penanganan bencana tidak hanya dikelola BPBD saja tetapi bisa dialokasikan melalui instansi lain yang juga terkait. Langkah ini merupakan integrasi sistem di pemerintah daerah," tandasnya.

Menurutnya, alokasi anggaran penanganan bencana bisa dilakukan melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP), Dinas Kesehatan, atau dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Masing-masing organisasi perangkat daerah tersebut memiliki kewenangan sesuai tugasnya. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPBD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005